

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM *SELF ASSESSMENT*

ARI BRAMASTO

Fakultas Ekonomi
Universitas Langlangbuana Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Menghitung Pajak Sendiri Pajak Penghasilan Badan baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan survei terhadap 67 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan instrumen kuesioner serta dilengkapi dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Sistem Menghitung Pajak Sendiri.

Kata kunci: Pajak, Kepatuhan, Akuntansi, Sistem

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun

daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Liberty Pandiangan (2002), di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha., pemerintah telah melakukan reformasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. sebagai upaya untuk memberikan keadilan,

kemudahan / efisiensi administrasi, dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assesment* yang lebih baik.

Reformasi Perpajakan di Indonesia yang diikuti dengan penyempurnaan perangkat perundangannya juga belum mendorong dan merangsang wajib pajak segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini terlihat antara kurun 2001 sampai 31 Desember 2003, jumlah wajib pajak patuh sebanyak 386 wajib pajak dengan perincian tahun 2001 -13 wajib pajak (dari 2.468.383 WP) 2002 - 157 (dari 2.583.960 WP) wajib pajak dan 2003 - 316 wajib pajak (dari 2.959.837 WP) (Sumber : *Majalah Berita Pajak No. 1521/Tahun XXXVI/15 Februari 2004*) Beberapa Penjelasan diatas menggambarkan bahwa, pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mencapai target penerimaan pajak termasuk juga pajak penghasilan. Pentingnya pajak penghasilan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak mendorong kantor-kantor pelayanan pajak menggali penerimaan pajak melalui pajak penghasilan termasuk Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang berada di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Moh. Zain (1991) mengemukakan bahwa : Dalam rangka pengawasan wajib pajak, meliputi pengawasan atas pemenuhan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagai indikator mengenai *kepatuhan wajib pajak*, dan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan melalui penelitian dan pemeriksaan sebagai alat pencegah timbulnya penyelundupan pajak. Selanjutnya pada Sistem *Self Assesment* yang kita anut dewasa ini, peranan Surat Pemberitahuan tersebut lebih kurang sama dengan ketentuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang

berarti untuk tahap pertama perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sebagai benar.

Disisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak badan *wajib melakukan pembukuan* sedang Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Direktorat Penyuluhan Perpajakan : 2001)

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi *A k u n t a n s i K e u a n g a n*). Gunadi (2001) menerangkan bahwa : Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assesment*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai

dengan target yang ditetapkan belum efektif.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan badan dan kualitas informasi akuntansi keuangan secara **bersama-sama** berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri?
3. Apakah kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kepatuhan wajib pajak penghasilan badan dan kualitas informasi akuntansi keuangan secara **bersama-sama** berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri.
2. Mengetahui kepatuhan wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri.
3. Mengetahui kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk operasional dan pengembangan ilmu sebagai berikut :

Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan penelitian sebagai kegunaan

pengembangan ilmu adalah :

- Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan & Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara simultan dan secara parsial terhadap terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak.
- Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi perpajakan.
- Merupakan referensi dalam ilmu akuntansi yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran perpajakan.

Kegunaan Operasional

Kegunaan penelitian sebagai kegunaan operasional adalah :

- Bagi Direktorat Jendral Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Cimahi di Kota Administratif Cimahi, dalam usaha memahami perilaku, kepatuhan dan kualitas informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan wajib pajak badan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi efektivitas sistem menghitung pajak sendiri pajak penghasilan yang diterapkan dan mengadakan perbaikan seperlunya.
- Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak badan & kualitas informasi akuntansi keuangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem menghitung pajak sendiri yang dihasilkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2003)

Waluyo dan Wirawan (2003) mengemukakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowak (1970) mengemukakan terdiri dari : Pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya.

Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi

Keuangan

Informasi akuntansi dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus berkualitas. Kualitas suatu informasi akuntansi adalah informasi akuntansi keuangan merujuk pada kemampuan informasi tersebut efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang efektif harus mengacu pada standar yang ada.

Dikemukakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:7), yaitu terdapat empat karakteristik kualitatif pokok dari informasi laporan keuangan yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan :

1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami.
2. Relevan
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Karakteristik dari informasi adalah informasi tersebut pada umumnya harus

akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap agar informasi tersebut dapat berguna dan memberikan nilai tambah bagi pengambil keputusan.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat 7 bahwa Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Kewajiban Wajib Pajak dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 KUP : Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan **benar, lengkap, jelas**, dan menandatangani.

Menghitung Pajak Sendiri

Mohammad Zain (2003) mengemukakan bahwa sistem menghitung pajak sendiri, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya **B. Boediono**, (2000:86) mengemukakan bahwa : Sistem dan Mekanisme pemungutan Pajak menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan nasional yang meliputi:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai tercermin kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota Masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem perhitungan, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sehingga dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Sistem Perpajakan Nasional mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kelebihan sistem perpajakan nasional adalah mencatumkan adanya ketentuan yang menjamin untuk memberikan adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak tersebut.

Karakteristik Efektivitas

Efektivitas sering dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi/ manajemen. **T. Hani Handoko** (1999) mengartikan efektivitas sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sedangkan **Mardiasmo** (2002) mengartikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan tujuan dengan hasil yang dicapai.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi. Penelitian ini dilaksanakan pada 67 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Dalam penelitian ini, jumlah wajib pajak badan Kantor Pelayanan Pajak Cimahi sebagai populasi, relatif besar sehingga berdasarkan waktu dan biaya yang tersedia jumlah tersebut tidak mungkin untuk diteliti secara keseluruhan, dengan demikian dalam penelitian ini diambil sampel yang dianggap representatif untuk mewakili populasi perusahaan wajib pajak badan Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui wawancara baik secara tertulis maupun lisan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain analisis kausalitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Unit Analisis dan Populasi Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar yang berada dalam ruang lingkup kewenangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada argumentasi bahwa pada setiap wajib pajak, menjalankan kewajiban perpajakannya dilaksanakan berbeda sehingga kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akan berbeda pada setiap wajib pajak badan. Dengan

adanya perbedaan tersebut kemungkinan besar diduga tingkat efektivitas sistem menghitung pajak sendiri sesuai dengan potensi pajak penghasilan yang ada di masing-masing wajib pajak badan juga akan berbeda. Responden dalam penelitian adalah Petugas Pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan tempat wajib pajak tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak.

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang membayar dan melapor pajak badannya di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. Wajib Pajak Badan yang dimaksud adalah BUMN/ BUMD dan Swasta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Cimahi terdapat 7565 wajib pajak badan yang terdiri dari, 62 wajib pajak BUMN/ BUMD dan 7503 wajib pajak Swasta, yang perinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perincian Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada KPP CIMAHI (Kantor Pelayanan Pajak Cimahi)

No.	Kelompok Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Prosentase (%)
1.	BUMN/ BUMD	62	0,82
2.	Swasta	7.503	99,18
	Jumlah	7.565	100,00

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Dengan metode ini, semua mempunyai hak yang sama untuk dipilih. Teknik pengambilan sampel ini dapat dilakukan karena populasi dianggap homogen (Sekaran, 2000).

Menentukan ukuran sampel (*sample size*) minimal, digunakan rumus (Harun Al Rasjid, 1994). Penelitian ini menggunakan analisis korelasi maka ukuran sampel

$$Z_{(1-\alpha/2)} = 1.96 \quad Z_{(1-\beta/2)} = 1.44$$

Iterasi pertama :

$$U_p = \frac{1}{2} \text{Ln} \left(\frac{1+0,40}{1-0,40} \right) = 0,423649$$

$$n = \frac{(1,96+1,44)^2}{(0,423649)^2} + 3 = 67,39 \approx 68$$

Iterasi kedua :

$$U_p = \frac{1}{2} \text{Ln} \left(\frac{1+0,40}{1-0,40} \right) + \frac{0,40}{2(68-1)} = 0,426661$$

$$n = \frac{(1,96+1,44)^2}{(0,426661)^2} + 3 = 66,48 \approx 67$$

yang digunakan didasarkan pada ukuran sampel minimal untuk metode korelasi.

Dalam penelitian digunakan taraf nyata (α) = 0,05 dan kuasa uji ($1 - \beta$) = 0,85 serta dengan memperkirakan koefisien korelasi (ρ) terkecil antara variabel Xi dengan variabel Y secara intuitif sebesar 0,4, dan diperoleh nilai z pada distribusi normal pada pengujian dua arah sebagai berikut

Karena dari iterasi pertama dan kedua diperoleh nilai n yang berbeda, maka harus dilakukan iterasi ketiga.

Iterasi ketiga :

$$U_p = \frac{1}{2} \text{Ln} \left(\frac{1+0,40}{1-0,40} \right) + \frac{0,40}{2(67-1)} = 0,426703$$

$$n = \frac{(1,96+1,44)^2}{(0,426703)^2} + 3 = 66,47 \approx 67$$

Karena nilai n untuk iterasi kedua dan ketiga telah sama, maka nilai n ini diambil sebagai ukuran sampel minimal. Jadi jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 responden. Sampel yang diteliti ditentukan dengan cara diundi dan hasilnya diperoleh terdiri 67 wajib pajak Swasta sedangkan kelompok wajib Pajak

$$\text{Rentang alternatif jawaban} = \frac{\text{Total nilai tertinggi}}{\text{Jumlah alternatif jawaban}}$$

BUMN/ BUMD tidak dapat dijadikan sampel dengan alasan Kelompok wajib pajak tersebut merupakan kantor perwakilan atau cabang, meskipun terdaftar di KPP Cimahi tetapi kewajiban Pajak Penghasilan Badan dilaksanakan di Kantor Pusat masing-masing.

Variabel dan Pengukurannya

Variabel independen dari penelitian ini meliputi : Kepatuhan Wajib Pajak (X_1), dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Tabel 2. Klasifikasi Skor (Bobot) jawaban

Alternatif Jawaban	Klasifikasi Yang Dinyatakan dalam Prosentase (%)	Klasifikasi yang Dinyatakan Dalam intensitas (kali)	Bo bot
A	(81 - 100) %	(10 - 12) kali dalam setahun	5
B	(61 - 80) %	(7 - 9) kali dalam setahun	4
C	(41 - 60) %	(5 - 6) kali dalam setahun	3
D	(21 - 40) %	(2 - 4) kali dalam setahun	2
E	< 21 %	< 2 kali dalam setahun	1

(X_2).

Penentuan rentang untuk masing-masing alternatif jawaban mengacu kepada ketentuan Arikunto (1993), yaitu dengan cara membagi total nilai tertinggi dengan jumlah alternatif jawaban.

Klasifikasi pembobotan untuk masing-masing alternatif jawaban adalah sebagai berikut (Tabel 2).

Variabel Dependen

Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini Efektivitas sistem menghitung pajak sendiri diukur dengan menggunakan skala rasio yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan dengan target penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.

Efektivitas sistem menghitung pajak sendiri =

$(\text{Realisasi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan}) / (\text{Target penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan}) \times 100\%$

Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk diolah adalah data primer dengan metode survei yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke setiap petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi.

Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari kuesioner sebelum dilakukan analisis data dilakukan pengeditan dan pengkodean untuk setiap butir pertanyaan dari setiap variabel. Setelah proses ini maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan korelasi

Spearman Rank dan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Split Half*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis Secara Simultan

Hasil pengujian koefisien regresi secara simultan menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah 136,632 dimana nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel untuk $\alpha = 0.05$. Dari tabel F untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2), diperoleh nilai $F_{tabel} = 3,140$, karena F_{hitung} lebih besar dibanding F_{tabel} maka dengan derajat kekeliruan 5% ($\alpha=0.05$), H_0 ditolak.

Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi.

Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Sistem Self Assesment

Hasil perhitungan diperoleh dengan nilai $t_{hitung} = 6,924$ sedangkan dari tabel t -student untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = 64 pada pengujian dua sisi diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,669$.

Dengan kriteria pengujian dua sisi adalah "tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$, karena nilai t_{hitung} untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dari t_{tabel} maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_1 diterima,

sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi.

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Pajak terhadap Efektivitas Sistem Self Assesment

Hasil perhitungan diperoleh dengan nilai t -hitung = 9,009 sedangkan dari tabel t -student untuk $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas = 64 pada pengujian dua sisi diperoleh nilai t -tabel = 1,669.

Dengan kriteria pengujian dua sisi adalah "**tolak H_0 jika t -hitung > t -tabel atau t -hitung < $-t$ -tabel**", karena nilai t -hitung untuk variabel Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan lebih besar dari t -tabel maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak H_1 diterima, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.791	.774	.3137

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap kinerja manajerial pada terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment* pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi

Sedangkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dilihat dari Adjusted R Square, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 81,0 % terhadap Efektivitas Sistem *Self*

Assesment pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi. Besarnya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 19,0 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Kota Cimahi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari : mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya dan Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang terdiri dari : benar, lengkap dan jelas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment*.
2. Karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari : mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment*. Begitu pula Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang terdiri dari : benar, lengkap dan jelas secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment*..

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, diharapkan agar:
 - Melaksanakan sosialisasi aturan atau ketentuan baru perpajakan, jangka pendek untuk berlangsungnya pemenuhan

- kewajiban perpajakan dengan benar. Sementara untuk jangka panjang adalah bagaimana membentuk masyarakat yang tahu dan paham pajak sehingga pada akhirnya sadar dan peduli pajak dengan wujud kepatuhan sukarela yang bisa terus meningkat dari tahun ke tahun.
- Menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan bagi petugas pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pajak sehingga menjamin kecepatan, keakuratan dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas, aktivitas pengawasan dan pembinaan kepatuhan Wajib Pajak didukung sarana dan prasarana berbasis teknologi terkini.
 - Menyediakan fasilitas yang berbasis teknologi informasi, yang dapat memonitoring seluruh data informasi akuntansi keuangan wajib pajak, sehingga dapat membandingkan antar SPT Wajib Pajak, membandingkan SPT dengan data wajib pajak dan data dari pihak ketiga dan atau informasi lain, membandingkan seluruh data wajib pajak dengan profile wajib pajak yang dimutakhirkan terus menerus.
 - Mampu dan memiliki integritas yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak di satu sisi, serta disisi lain membawa diri dan wajib pajak untuk sama sama saling terbuka demi optimalnya penerimaan pajak.
2. Bagi Peneliti berikutnya, disarankan agar dalam penelitian selanjutnya:
- Menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, seperti: peraturan-peraturan perpajakan, aspek perilaku wajib

pajak, kemampuan dan kualitas petugas pajak, biaya pemungutan pajak, faktor sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya yang belum diamati dalam penelitian ini.

- Memperluas populasi dan sampelnya serta jika memungkinkan meneliti berdasarkan wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi sehingga hasilnya dapat digeneralisir untuk Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain adalah:

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi saja.
2. Hasil penelitian ini sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab kuesioner, namun peneliti telah berusaha untuk meminimalkan terjadinya ketidakjujuran dengan cara mendampingi langsung pengisian kuesioner serta melakukan wawancara kepada para responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pusat Penyuluhan Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak, Jakarta.
- Anonymous, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*, Pusat Penyuluhan

- Perpajakan bekerjasama dengan Majalah Berita Pajak, Jakarta.
- Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- B. Boediono, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua Penerbit DIADIT MEDIA, Jakarta.
- Boediono, 2004, *Berita Pajak : Menkeu – Kapolri Tanda tangan MoU Penanggulangan Tindak Pidana Pajak (Aneka Berita) DJP: Ditjen Pajak Jakarta*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2001. *Buku Panduan Perpajakan Bagi BUMN/* .: Direktorat Penyuluhan Perpajakan. Jakarta
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Bagian Barat II Kantor Pelayanan Pajak Cimahi. *Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan PPh Tahun 2003-2004 & Laporan Keadaan SPT PPh 2004 Yang Diterima*. Nopember 2005, KPP Cimahi, Cimahi
- Direktorat Informasi Perpajakan, *Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak Unit KPP Cimahi Bulan Januari s.d. Oktober 2005*, KPP Cimahi, Cimahi
- Gunadi, 1999, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta
- Harun Al – Rasyid, 1994, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, Diktat Kuliah*, Bandung: UNPAD.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indriantoro N dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*, BPF, Yogyakarta.
- Kieso, E., Weygandt, J., and Warfield., Terry D. 2004. *Intermediate Accounting*. 11st Edition. John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta halaman 4
- Zain, M., 1991, *Desertasi: Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)*, tidak dipublikasikan, UNPAD, Bandung halaman 28-29
- Zain, M., 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta halaman 112.

